



**DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

Jakarta, 13 Februari 2026

Kepada

Yth. 1. Sekretaris Dinas
2. Para Kepala Bidang
3. Para Kepala Suku Dinas
4. Para Kepala UPT
5. Para Kepala Satuan Pendidikan Negeri
di Lingkungan Dinas Pendidikan
Provinsi DKI Jakarta
di
Jakarta

**SURAT EDARAN
NOMOR 36/SE/2026
TENTANG**

**JAM KERJA APARATUR SIPIL NEGARA (ASN), PENYEDIA JASA LAINNYA
PERORANGAN (PJLP) DAN KONTRAK KERJA INDIVIDU (KKI)
SELAMA BULAN SUCI RAMADAN TAHUN 2026 M/1447 H
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN PROVINSI DKI JAKARTA**

Menindaklanjuti Surat Edaran Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1/SE/2026 tentang Jam Kerja pada Bulan Suci Ramadan Tahun 2026 M/1557 H, dengan ini saya mohon perhatian Saudara hal-hal sebagai berikut:

1. Ketentuan jam kerja reguler ASN dan PJLP yaitu:

No.	Hari	Jam Kerja selama Bulan Suci Ramadan	Kode Shift
1	Senin s.d. Kamis	Pukul 08.00 s.d. Pukul 15.00 Pukul 12.00 s.d. Pukul 12.30 (waktu istirahat)	RAM8
2	Jumat	Pukul 08.00 s.d. Pukul 15.30 Pukul 11.30 s.d. Pukul 12.30 (waktu istirahat)	RAM8J

2. Ketentuan jam kerja ASN dan KKI di Satuan Pendidikan Negeri yaitu:

No.	Hari	Jam Kerja selama Bulan Suci Ramadan
1	Senin s.d. Kamis	Pukul 06.30 s.d. Pukul 13.30 Pukul 12.00 s.d. Pukul 12.30 (waktu istirahat)
2	Jumat	Pukul 06.30 s.d. Pukul 14.00 Pukul 11.30 s.d. Pukul 12.30 (waktu istirahat)

3. Ketentuan jam kerja ASN dan KKI di Satuan Pendidikan Negeri yang melaksanakan kegiatan pada siang/petang hari yaitu:

No.	Hari	Jam Kerja selama Bulan Suci Ramadhan
1	Senin s.d. Kamis	Pukul 09.00 s.d. Pukul 16.00 Pukul 12.00 s.d. Pukul 12.30 (waktu istirahat)
2	Jumat	Pukul 09.00 s.d. Pukul 16.30 Pukul 11.30 s.d. Pukul 12.30 (waktu istirahat)

4. Pegawai ASN, PJLP, dan KKI yang bekerja menggunakan aturan *shift*, tetap mengikuti jadwal *shift* masing-masing.
5. Pegawai ASN yang menggunakan jam kerja regular diberikan fleksibilitas jam kerja (*flexible working hour*) dengan ketentuan sebagai berikut:
- tidak memberikan pelayanan kepada masyarakat yang tidak dapat dilaksanakan melalui aplikasi yang digunakan secara resmi oleh perangkat daerah;
 - satuan pendidikan tidak diberikan fleksibilitas jam kerja;
 - tidak sedang melaksanakan tugas kedinasan yang bersifat mendesak/harus diselesaikan pada hari berkenaan atau dilaksanakan di luar kantor dan;
 - diberikan untuk paling cepat 60 (enam puluh) menit sebelum ketentuan jam masuk kerja dan paling lama 60 (enam puluh) menit setelah ketentuan jam masuk kerja dengan penyesuaian jam pulang bekerja secara proporsional pada hari berkenaan dengan jumlah akumulasi 6,5 (enam koma lima) jam dalam satu hari diluar waktu istirahat.

Contoh :

- 1) fleksibilitas 60 (enam puluh) menit sebelum ketentuan jam masuk kerja:
 - a) pegawai yang hadir masuk bekerja di kantor dan melaksanakan tugas pada hari Selasa pukul 06.30 WIB, maka yang bersangkutan dapat diberikan penyesuaian jam pulang bekerja lebih awal, yaitu pada pukul 14.00 WIB;
 - b) pegawai yang hadir masuk bekerja di kantor dan melaksanakan tugas pada hari Kamis pukul 07.00 WIB, maka yang bersangkutan dapat diberikan penyesuaian jam pulang bekerja lebih awal, yaitu pada pukul 14.00 WIB;
 - c) pegawai yang hadir masuk bekerja di kantor dan melaksanakan tugas pada hari **Jumat** pukul 07.30 WIB, maka yang bersangkutan dapat diberikan penyesuaian jam pulang bekerja lebih awal, yaitu pada pukul 15.00 WIB.
- 2) fleksibilitas 60 (enam puluh) menit setelah ketentuan jam masuk kerja:
 - a) pegawai yang hadir masuk bekerja di kantor dan melaksanakan tugas pada hari Rabu pukul 08.30 WIB, maka yang bersangkutan dapat diberikan penyesuaian jam pulang bekerja lebih lama, yaitu pada pukul 15.30 WIB;
 - b) pegawai yang hadir masuk bekerja di kantor dan melaksanakan tugas pada hari **Jumat** pukul 08.45 WIB, maka yang bersangkutan dapat diberikan penyesuaian jam pulang bekerja lebih lama, yaitu pada pukul 16.15 WIB;
 - c) pegawai yang hadir masuk bekerja di kantor dan melaksanakan tugas pada hari Selasa pukul 09.10 WIB, maka yang bersangkutan dapat diberikan penyesuaian jam pulang bekerja lebih lama, yaitu pada pukul 16.00 WIB, tetapi dikategorikan terlambat dan mendapat pengurangan capaian waktu

efektif kerja sebesar 10 (sepuluh) menit dalam sistem informasi tambahan penghasilan pegawai (e-tpp).

6. Pegawai ASN yang menggunakan fleksibilitas jam kerja setelah ketentuan jam masuk kerja kemudian mendapatkan penugasan di luar kantor (dinas luar akhir), maka pegawai tersebut telah memenuhi ketentuan jumlah jam kerja pegawai dalam satu hari.
7. Perhitungan waktu kerja bagi pegawai negeri sipil yang mendapatkan tambahan penghasilan pegawai berdasarkan beban kerja dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 69 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai dengan ketentuan memperhitungkan akumulasi 7,5 (tujuh koma lima) jam per hari kerja efektif di luar waktu istirahat dan ketentuan fleksibilitas jam kerja.
8. Surat Edaran ini berlaku mulai tanggal 1 Ramadan 1447 H yang berpedoman pada Keputusan Menteri Agama.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,

#

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala BKD Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta